

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengungkapan informasi secara terbuka mengenai perusahaan sangatlah penting bagi perusahaan publik. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen perusahaan kepada *stakeholders*. Keterbukaan informasi dari perusahaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi *stakeholders* dalam pengambilan keputusan. Seluruh perusahaan yang telah go publik dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia wajib memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebelum dipublikasikan kepada publik sesuai dengan keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep 17/PM/2002.

Laporan tahunan merupakan perangkat utama untuk menyampaikan informasi yang digunakan oleh manajemen kepada pihak-pihak di luar perusahaan yang mempunyai kepentingan di perusahaan tersebut. Laporan keuangan tahunan mengkomunikasikan kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang saham, kreditur, dan pengguna informasi lainnya. Sebagai media komunikasi, laporan keuangan harus dapat mempertemukan dua kepentingan, yaitu agen dan pemilik.

Pada tahun 2001 tercatat skandal keuangan di perusahaan publik yang melibatkan manipulasi laporan keuangan oleh PT Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005 dalam Nasution dan Setiawan 2007). Hal tersebut membuktikan bahwa praktik manipulasi laporan keuangan tetap dilakukan oleh pihak korporat meskipun sudah menjauhi periode krisis tahun 1997-1998. Salah satu penyebab kondisi ini adalah kurangnya penerapan *corporate governance*. Peristiwa tersebut menunjukkan lemahnya praktik *corporate governance* di Indonesia mengarah pada defisiensi pembuatan keputusan dalam perusahaan dan tindakan perusahaan (Alijoyo et al, 2004 dalam Nasution dan Setiawan 2007).

Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *Internasional Monetary Fund (IMF)* memperkenalkan dan mengintroduksir konsep *Corporate Governance (CG)* sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat. Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stakeholders*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. Penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank (ADB)* menyimpulkan penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah karena mekanisme pengawasan dewan komisaris dan komite audit suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan pengelolaan perusahaan yang belum professional. Dengan demikian, penerapan konsep *corporate governance* di Indonesia diharapkan dapat

meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*.

Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan, sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunistik manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya, tetapi dapat merugikan pemegang saham atau investor. Tindakan oportunistik tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur, yaitu dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan keinginannya. Perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba (*earnings management*). Berbagai bentuk manajemen laba seperti *taking a bath*, perataan laba (*income smoothing*), maksimalisasi atau minimalisasi pendapatan dapat dilakukan oleh pihak manajemen dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam standar akuntansi seperti penerapan kebijakan akuntansi atau pemilihan metoda akuntansi yang digunakan. Tindakan oportunistik manajemen laba dapat merugikan pemegang saham, dan informasi laba yang disajikan dapat menyebabkan keputusan investasi yang salah.

Menurut Healy dan Wahlen (1998) dalam Midastry (2003) manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan transaksi untuk mengubah laporan keuangan sebagai dasar kinerja perusahaan yang bertujuan menyetatkan pemilik atau pemegang saham, atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Manajemen laba dapat terjadi karena manajer diberi keleluasaan untuk memilih metode akuntansi yang akan digunakan dalam mencatat dan mengungkapkan informasi keuangan privat yang dimilikinya.

Menurut teori keagenan (*agency theory*) untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan antara *principal* dan *agent* salah satunya adalah melalui pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.

Corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, *pertama* pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan *kedua* kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders*.

Implementasi prinsip-prinsip *corporate governance* menyangkut pengembangan dua aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). *Hardware* yang lebih bersifat teknis mencakup pembentukan atau perubahan struktur dan sistem organisasi. Sedangkan *software* lebih bersifat psikososial mencakup perubahan visi, misi, nilai, sikap atau etika berperilaku. Dalam praktik nyata di dunia bisnis, sebagian besar perusahaan ternyata lebih menekankan pada aspek *hardware*, seperti penyusunan sistem dan prosedur serta pembentukan struktur organisasi. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena aspek *hardware* hasilnya lebih mudah dilihat dan dapat dilakukan lebih cepat jika dibandingkan dengan aspek *software*.

Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh *return* atas investasinya dengan benar. *Corporate governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor korporat. *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lain, misalnya suatu bank harus memenuhi

kriteria CAAR (*Cumulative Average Abnormal Return*) minimum. Bank Indonesia (BI) pada tanggal 30 Januari 2006 telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum. Tujuan dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Pokok-pokok pelaksanaan *good corporate governance* diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern (*internal control*) bank, penerapan fungsi kepatuhan auditor internal dan auditor eksternal, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategis bank dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank. Dalam ketentuan yang mulai berlaku sejak diterbitkan tanggal 30 Januari 2006, setiap Bank diwajibkan melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) atas pelaksanaan *good corporate governance*, menyusun laporan pelaksanaan *good corporate governance* tersebut secara berkala, dan kemudian akan dinilai oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank (apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat atau tidak). Oleh karena itu manajer mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba supaya perusahaan mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh Bank Indonesia (Setiawan dan Na'im, 2001, dan Rahmawati dan Baridwan 2006 dalam Nasution dan Setiawan, 2007). Setiawan dan Na'im, 2001 dalam Nasution dan Setiawan, 2007 beragumen bahwa laporan keuangan yang telah direkayasa oleh manajemen dapat mengakibatkan distorsi dalam alokasi dana. Selain itu industri perbankan merupakan industri kepercayaan. Jika investor berkurang kepercayaannya karena laporan keuangan yang bias karena tindakan manajemen laba, maka mereka akan melakukan penarikan dana secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan *rush*. Oleh karena itu, perlu suatu mekanisme untuk meminimalkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan, yaitu melalui mekanisme *corporate governance*.

Penelitian mengenai *corporate governance* dan *earnings management* telah banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian Midiastuty dan Machfoedz (2003), Wedari (2004), Boediono (2005), Siregar dan Utama (2005), Nasution dan Setiawan (2007), Ujijantho dan Pramuka (2007), Tarjo (2008), dan Nuryaman (2008). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Midiastuty dan Machfoedz (2003) menunjukkan bahwa praktek *corporate governance* mampu mengurangi konflik

kepentingan yang timbul dari hubungan keagenan antara manajemen dengan pemegang saham.

Atas dasar paparan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba (Study Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba ?
3. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* yang meliputi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi keuangan mengenai *agency teory* sehingga dapat memperoleh model-model yang secara konseptual mempengaruhi tindakan manajemen laba dan dampaknya terhadap tingkat kekuatan responsif laba yang dilaporkan.
2. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi investor untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasinya di pasar modal.
3. Dapat memberikan kontribusi terhadap akademisi, dosen, dan mahasiswa sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis di masa datang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori keagenan, *corporate governance*, manajemen laba, variabel independen, model yang digunakan, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, variabel dan pengukurannya, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan analisis data. Pada bab ini peneliti menyajikan dan menjelaskan hasil analisis data dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.